

**Jurnal**  
**PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**  
**Indonesian Journal of Coastal Zone and Small Islands**

Vol.1 No.1 Oktober 2012



# Jurnal

## PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Indonesian Journal of Coastal Zone and Small Islands

ISSN: 2302-5832, EDISI VOL.I NO.1 OKTOBER 2012

**Pemimpin Redaksi (*Editor in-Chief*)**

Dietrich G. Bengen

**Dewan Redaksi (*Editorial Board*)**

Irwandi Idris  
Daniel M. Rosyid  
Johannes Hutabarat  
Niette Huliselan  
Budimawan  
Fredinan Yulianda  
M. Eko Rudianto  
Luky Adrianto

**Konsultan Redaksi (*Consulting Editors*)**

Rokhmin Dahuri  
Alex S.W. Retraubun  
Sudirman Saad  
Tridoyo Kusumastanto  
Natsir Nessa  
Indra Jaya  
Brian Crawford

**Sekretaris Redaksi (*Editorial Secretary*)**

M. Iqbal Djawad

**Desain Grafis (*Graphic Designer*)**

Pasus Legowo

**Alamat Redaksi (*Editorial Address*)**

Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI)  
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Gedung Mina Bahari II, Lantai 7  
Jl. Medan Merdeka Timur No.16  
Telp. (021) 3522059, 3519070, Fax. (021) 3522059  
email: dieter@indo.net.id

Halaman muka (cover): Senja di pantai Losari, Makassar  
Foto (photo): Dietrich G. Bengen

## MANAJEMEN KOLABORATIF ZONA PEMANFAATAN TRADISIONAL TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH

RONI BAWOLE<sup>1</sup>, FREDINAN YULIANDA<sup>2</sup>, DIETRIECH G. BINGEN<sup>2</sup>  
DAN ACHMAD FAHRUDIN<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Papua, Manokwari

<sup>2</sup>Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor

### ABSTRAK

Sumberdaya pesisir dan lautan telah dikelola melalui pengaturan kolaboratif antara masyarakat, pemerintah dan masyarakat sipil. Bagaimanapun, pengaturan kolaboratif dari manajemen pesisir merupakan akumulasi dari kegiatan yang berhasil dan gagal. Jadi, kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam menata sumberdaya pesisir. Tatakelola zona pemanfaatan tradisional (ZPT) dilakukan melalui pemahaman dan manipulasi dari sistem yang rumit tentang komponen sumberdaya manusia dan pesisir. Kelompok dengan divergensi kepentingan dan keahlian dapat bekerjasama melalui mekanisme manajemen kolaboratif dalam rangka meningkatkan pembangunan berkelanjutan ZPT. Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) sebagai lembaga pemerintah membangun proses manajemen kolaborasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berpengaruh. Pertukaran informasi dan diskusi dengan berbagai pihak akan membangun kapasitas lembaga dan berkontribusi bagi struktur manajemen kolaboratif, implementasi rencana pengelolaan, kebijakan dan koordinasi dalam manajemen ZPT. Manajemen kolaboratif diwujudkan dalam mengoptimalkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tujuan lembaga dan strategi pengelolaan.

Kata-kata kunci: manajemen kolaboratif, zona pemanfaatan tradisional, manajemen, taman nasional

### PENDAHULUAN

Manajemen kolaboratif (*collaborative management* atau *co-management*), sering disebut sebagai *participatory management*, *shared-management*, *multi-stakeholder management*, adalah bentuk pengelolaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dengan mekanisme kerjasama, yang didorong oleh pengakuan hak pada setiap pihak, dalam rangka mencapai tujuan manajemen secara bersama (Borrini-Feyerabend 1996). Manajemen ini memungkinkan semua pihak dapat mengambil peluang dan manfaat dalam menciptakan keuntungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melindungi dan mempertahankan fungsi/

dinamika ekologis sumberdaya. Dengan demikian setiap pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam berbagi wewenang, tanggung jawab dan peran dalam dalam mencapai tujuan pengelolaan. Namun belum semua pihak menyadari pentingnya kolaboratif manajemen bagi kelestarian fungsi ekologis sumberdaya dalam memajukan kegiatan ekonomi masyarakat.

Awalnya, penelitian inovatif manajemen kolaboratif sebagai potensi kolaboratif dimulai pada masyarakat Aborigin dan lembaga pemerintah (Pinkerton 1989; Berkes 1989). Selanjutnya, manajemen kolaboratif ini menarik perhatian peneliti dan pengelola kawasan untuk diadopsi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Konsep manajemen kolaboratif dipublikasikan

sebagai tradisi intelektual yang muncul sebagai pendekatan dan acuan dalam pengelolaan sumberdaya alam (Natcher *et al.* 2005). Selama 20 tahun terakhir pemahaman tentang pengelolaan bersama telah diperkaya dengan berbagai terminologi yang disempurnakan (Berkes *et al.* 1991; Yandle 2003; Phummer & Fitzgibbon 2004a); kasus praktek pengelolaan bersama (Pomeroy 1996; Symes 1997); penyempurnaan konsep (Pomeroy & Berkes, 1997; Phummer & Fitzgibbon, 2004b; Carlsson & Berkes 2005); dan pengkajian pemahaman teoritis (Pinkerton, 2003).

Pengelolaan zona pemanfaatan tradisional kawasan konservasi laut (ZPT-KKL) Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC) pada awalnya dipandang hanya dalam konteks perlindungan fungsi ekologis semata. Perubahan orientasi pemanfaatan sumberdaya nyata terjadi ketika Kabupaten Teluk Wondama dimekarkan Tahun 2002 (Bawole *et al.* 2011). Pengembangan pembangunan dalam kawasan berdampak pada beragamnya kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya oleh berbagai individu dan kelompok masyarakat. Di sisi lain pertambahan penduduk, perluasan pemukiman, perkembangan kegiatan perikanan, dan semakin meningkatnya kegiatan transportasi laut, menyebabkan kawasan TNTC mendapat tekanan ekologis yang berdampak pada eksploitasi sumberdaya yang terus menerus. Berbagai persoalan telah muncul terkait dengan kegiatan pengelolaan TNTC, dan masalah ini dapat ditemukan pada berbagai kajian; resolusi konflik pengelolaan TNTC (Sembiring *et al.* 2010); peran *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata TNTC (Siregar 2011); dan keberlanjutan tatakelola ZPT-KKL TNTC (Bawole *et al.* 2011). Permasalahan-permasalahan pengelolaan tersebut lebih disebabkan oleh terbatasnya kapasitas manajemen, kurangnya pemahaman dan dukungan dari berbagai lembaga terkait,

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam usaha-usaha konservasi serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Mengatasi berbagai masalah tersebut perlu dikembangkan konsep pengelolaan yang dapat menyatukan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya TNTC khususnya dalam batas administrasi Kabupaten Teluk Wondama mengingat kabupaten ini sekitar 100% wilayah lautnya merupakan kawasan TNTC.

Praktek-praktek pemanfaatan ZPT-KKL selama ini belum optimal dalam memperhatikan kelestarian fungsi kawasan, seperti adanya pelanggaran pemanfaatan zona TNTC dan kegiatan eksploitasi yang cenderung menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Sementara itu, pengelola BBTNTC belum efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana, dukungan instansi teknis terkait yang rendah, serta luasnya kawasan TNTC. Disamping itu, diberlakukannya otonomi daerah melalui pemekaran daerah kabupaten pada tahun 2002 telah memberi peluang pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama ikut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jika hal ini tidak diatur lebih lanjut akan mengganggu pencapaian tujuan konservasi akibat adanya kerusakan lingkungan sehingga pemanfaatan sumberdaya tidak dapat berlanjut.

Kerjasama kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dalam ZPT-KKL telah berlangsung tetapi hal ini belum optimal. Bawole *et al.* (2011) memperlihatkan bahwa keberlanjutan tatakelola ZPT-KKL TNTC sekitar 36% dan dikategorikan pada kondisi kurang berkelanjutan. Pengelolaan kolaboratif belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *co-management* yang dibutuhkan terutama mekanisme kelembagaan yang menuntut kesadaran dan distribusi tanggung-jawab antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain secara formal. Dengan demikian perlu disusun konsep manajemen

kolaboratif untuk pemanfaatan dalam kawasan ZPT-KKL untuk mengakomodir kepentingan semua pihak. Pelaksanaan manajemen kolaboratif sesungguhnya merupakan mandat UU 5/1990 dengan peraturan turunannya Permenhut 19/2004. Pelaksanaan proses kerjasama para pihak yang bersepakat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan saling memberikan manfaat melalui manajemen kolaboratif. Dengan demikian argumentasi dan pertanyaan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana upaya kegiatan konservasi selama ini? Bagaimana sintesis manajemen kolaboratif digunakan untuk mempromosikan pengelolaan bersama? Dua hal ini merupakan inti kajian dalam pembahasan tulisan ini.

## METODE

Kegiatan tahap awal penelitian dimulai pada Agustus 2010, dan berlanjut hingga Juni 2011, dengan lokasi penelitian adalah kawasan TNTC yang terletak pada daerah administratif Kabupaten Teluk Wondama. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode observasi dan pengukuran langsung terhadap obyek penelitian melalui *focus group discussion* serta kuesioner terstruktur. Penentuan sampel informan kunci dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah pelaku baik individu maupun lembaga dan sangat memahami permasalahan pengelolaan kawasan konservasi. Sebanyak 35 orang para pemangku kepentingan mewakili individu dan lembaga. Mereka diambil secara hirarki dari kampung, distrik (kecamatan), kabupaten dan provinsi, dan mewakili semua kepentingan dalam kegiatan pengelolaan ZPT-KKL. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yang didasarkan pada data deskripsi dari suatu

keadaan, status, sikap, hubungan dalam suatu masalah yang menjadi obyek penelitian (Suratmo, 2000). Metode ini diadopsi pula oleh Purwanti (2008) dalam penelitian Co-Management di Taman Nasional Karimunjawa. Fakta dan sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diteliti, ditelaah dan dianalisis keterkaitannya satu sama lain dengan cara triangulasi. Hasil analisis disajikan dengan cara membuat deskripsi dan gambaran yang sistematis untuk mencari pemecahan masalah (Sitorus 1998).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Upaya Pengelolaan.** TNTC sebagai salah taman nasional berada dalam dua wilayah administrasi kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua. TNTC memiliki 460 jenis karang, yang terdiri dari 67 genus dan sub genus 260 jenis karang *Scleractinia* tersebar pada tepi pulau-pulau (TNC, WWF, Unipa, CII, BBTNTC 2006). Kekayaan lain berupa 836 jenis ikan yang terdiri dari jenis ikan estuari, ikan penghuni daerah mangrove, ikan karang, ikan pelagis, dan dicatat pula 201 spesies moluska. Keragaman flora-fauna daratan terdiri dari 17 jenis vegetasi mangrove, 9 jenis vegetasi hutan pantai, 35 jenis vegetasi hutan daratan, 7 jenis lamun, 184 jenis burung, 14 jenis mamalia dan 17 jenis reptilia.

Gangguan kawasan yang sangat menonjol antara lain adanya kapal-kapal penangkap ikan *illegal*, penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom dan bahan kimia (*potasium cyanida*, cairan tembakau), pemanfaatan dan pengambilan biota laut yang dilindungi dengan cara yang tidak sesuai dengan asas konservasi, serta lalulintas transportasi bagi kapal (PELNI, kapal perintis, kapal niaga dan nelayan tradisional) yang melewati sebagian kawasan TNTC.

Mengantisipasi berbagai ancaman dan gangguan sekaligus dalam upaya memaksimalkan fungsi ekologis kawasannya, pada tahun 2009 ini telah dikeluarkan dokumen Rencana Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Periode 2010 – 2029, dengan pendekatan sistem zonasi. Dokumen ini disusun sejak Tahun 2005 dan merupakan hasil revisi dari berbagai dokumen usulan penataan ruang kawasan TNTC pada tahun sebelumnya (WWF 1987; Proyek Bank Dunia 1994; Sub BKSDA I Irian Jaya 1996). Revisi dilakukan tidak hanya penambahan luas zona inti, tetapi juga penetapan batas yang lebih tegas terhadap batas kegiatan pemanfaatan (zona pemanfaatan umum, zona pariwisata, zona penangkapan) dan zona alur seperti kepentingan pelayaran. Pendekatan yang dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan TNTC Periode 2010 – 2029 adalah sistem zonasi dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nabire.

Kegiatan pengelolaan TNTC telah melalui sejarah yang panjang dalam penetapannya sebagai kawasan konservasi (Tabel 1). Otoritas

pengelolaan TNTC berada di bawah Balai Besar (BB) TNTC Papua Barat yang merupakan instansi vertikal (wakil pemerintah pusat) yang berada di daerah dan berkedudukan di Manokwari. Fungsi BBTNTC meliputi: (a) penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional, (b) pengelolaan kawasan taman nasional; (c) penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional, (d) pengendalian kebakaran hutan, (e) promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (f) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, (g) kerjasama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan, (h) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional, (i) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam, dan (j) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pengelolaan TNTC yang sedang berjalan saat ini terlihat masih bersifat sektoral dan belum adanya keterpaduan antar sektor pengguna. Hal ini tampak dari masalah berikut ini (Tabel 1).

Tabel 1 Sejarah penetapan TNTC sebagai kawasan konservasi

Tahun	Kejadian
1987	Rencana pengelolaan kawasan konservasi laut Teluk Cenderawasih di Irian Jaya oleh World Wildlife Fund (WWF)
1990	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam Laut melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:58/Kpts-II/1990 pada tanggal 3 Februari 1990 dengan luas ± 1.450.500 ha.</li> <li>• Sebagai Taman Nasional melalui pernyataan Menteri kehutanan pada acara Pekan Konservasi Alam Nasional di Mataram Nusa Tenggara Barat. Pernyataan ini tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor 448/Kpts-II/1990 pada tanggal 6 Maret 1990.</li> </ul>
1991-1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyek Pengembangan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dibawah pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam VIII Maluku-Irian Jaya</li> <li>• Ditunjuk Sebagai Taman Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 472/Kpts-II/1993 pada tanggal 2 september 1993 dengan luas 1.453.500 ha.</li> <li>• Rencana pengelolaan TNTC tahun 1994 – 2019 oleh Proyek Bank Dunia</li> </ul>
1995-1998	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana karya lima tahun TNTC 1997-2002 oleh Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Irian Jaya I</li> <li>• Proyek Pengembangan TNTC tahun 1996 berada di bawah pengawasan Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Irian Jaya I Sorong</li> <li>• Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Taman Nasional dan Unit Taman Nasional</li> <li>• Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih 1997 berada di bawah wewenang dan tanggungjawab Balai TNTC di Manokwari.</li> </ul>
2002	Ditetapkan sebagai Taman Nasional Teluk Cenderawasih berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor: 8009/Kpts-III/2002 pada tanggal 29 Agustus 2002 dengan luas 1.453.500 ha, terdiri dari 68.000 ha daratan yang meliputi 12.400 ha (0,85 %) pesisir pantai, 55.800 ha (3,84 %) daratan pada pulau-pulau, 80.000 ha (5,5 %) terumbu karang dan luas lautan 1.305.500 ha (89,8 %).
2007	Balai TNTC berubah menjadi Balai Besar TNTC yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-III/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenhut No. P.52/Menhut-III/2009 tanggal 27 Juli 2009 mengamanatkan bahwa BBTNTC sebagai unit pelaksana teknis taman nasional melakukan tugas pokok berupa penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</li> <li>• Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 121/IV-KK/2009 tentang zonasi TNTC yang dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan TNTC Tahun 2010 – 2029</li> </ul>

1. Kawasan TNTC secara administrasi pemerintahan terletak pada dua kabupaten (Teluk Wondama dan Nabire), sementara otoritas kendali pengelolaan TNTC secara formal berada dalam tanggung-jawab BBTNTC (Balai Besar TNTC) Departemen Kehutanan. Pada sisi lain pemerintah daerah dengan Satuan Perangkat Daerahnya (SKPD) merasa penduduk yang tinggal di sekitar TNTC berada dalam lingkup kerja pemerintah. Akibatnya, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering berbenturan dengan program/kegiatan BBTNTC;
2. Belum mengakomodasi berbagai kepentingan pemangku kepentings, dan belum terlihat dilibatkannya masyarakat secara penuh dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sejauh pengamatan peneliti di lapang masih belum terwakilinya aspirasi kelompok masyarakat dari perwakilan masing-masing kampung sehingga keberatan masyarakat atas penetapan zonasi TNTC masih sering terjadi;
3. Belum terpadunya program kegiatan antar sektor pelaku pembangunan (instansi/dinas terkait) dalam satu paket kegiatan dan pengelolaan terpadu. Hal terlihat karena kenyataannya masing-masing sektor membuat program kegiatan sendiri, belum tampak keterpaduan program kegiatan secara sinergis baik di lingkup Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Propinsi maupun dengan Pemerintah Pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan), sehingga berimplikasi timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan konflik pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya dan ekosistem pesisir;
4. Sering terjadi penyalagunaan ijin dan lokasi kegiatan penangkapan ikan antar nelayan. Nelayan yang berasal dari Kabupaten Teluk Wondama menangkap ikan di perairan Kabupaten Nabire, atau sebaliknya;
5. Praktek-praktek penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan masih sering digunakan oleh masyarakat, sehingga akativitas ini dapat mempercepat laju degradasi sumberdaya pesisir dan laut.

Kebijakan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi belum mengarah kepada pengelolaan TNTC yang berkelanjutan. Berbagai dokumen rencana strategis pengelolaan kawasan masih berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya daratan dan hampir tidak bersinggungan dengan pesisir. Hal ini terlihat dari: (1) Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2006-2011; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2006-2011; (3) Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire 2007 – 2027; (4) Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama 2008 – 2028; (5) Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama 2008 – 2028; (6) Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat tahun 2006-2011; (7) Buku Peta Potensi Sumberdaya Kabupaten Teluk Wondama. Isi dokumen-dokumen tersebut masih terfokus pada isu-isu pokok pengelolaan kawasan daratan seperti penataan zonasi, konservasi alam, pengembangan wisata budaya dan kegiatan budidaya, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Akibatnya, implementasi keterpaduan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan belum terlihat detail formulasinya.

Pencapaian akuntabilitas kinerja kegiatan yang sudah dilakukan dan realisasi capaiannya pada tahun 2009 – 2010 secara agregat terjadi penurunan sebesar 9,55% (BBTNTC 2010). Penurunan kinerja justru terjadi pada kegiatan pengelolaan TNTC. Walaupun demikian, efektifitas pencapaian program kegiatan pada tahun 2010 meningkat 1,2% dibandingkan tahun



2009. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program dan rencana kerja, kegiatan pemantauan dan evaluasi tetap dipertahankan sehingga tidak mengalami peningkatan atau penurunan indikator kinerja. Kegiatan yang mengalami peningkatan seperti penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan, inventarisasi flora dan fauna, dan kegiatan pengembangan bina cinta alam. Kegiatan penegakan dan penyelesaian kasus hukum/kejahatan baru dimulai lagi pada tahun 2010 sehingga pengaruhnya di lapangan masih rendah, dengan tingkat capaian 23%. Hal menarik yang dapat dikemukakan terkait dengan akuntabilitas kegiatan di atas adalah indikator kinerja yang digunakan masih lebih menekankan pada terlaksananya suatu kegiatan sehingga lebih berorientasi pada pencapaian hasil kegiatan. Pada hal indikator yang baik harus menggambarkan aspek dampak (manfaat) jangka panjang yang dapat terjadi, misalnya ada/tidaknya peningkatan populasi ikan, perbaikan habitat/lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini BBTNTC perlu merumuskan *baseline indicator* yang menjadi acuan keberhasilan atau efektifitas pengelolaan.

**Mekanisme Manajemen Kolaboratif.** Kebijakan dan kelembagaan merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Kebijakan yang bagus tanpa dilandasi kelembagaan yang bagus atau sebaliknya akan sulit mencapai hasil maksimal. Dari pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan seringkali terjadi karena tatakelola pemerintahan (*good governance*) yang buruk dimana pemerintah gagal membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan. Pada dasarnya hampir semua kegagalan pembangunan bersumber dari dua persoalan fundamental yaitu kegagalan kebijakan dan kegagalan kelembagaan (Djogo *et al.* 2003). Kinerja pengelolaan taman nasional ditentukan

oleh kebijakan yang berbentuk peraturan perundangan dan organisasi pengelola atau lembaganya.

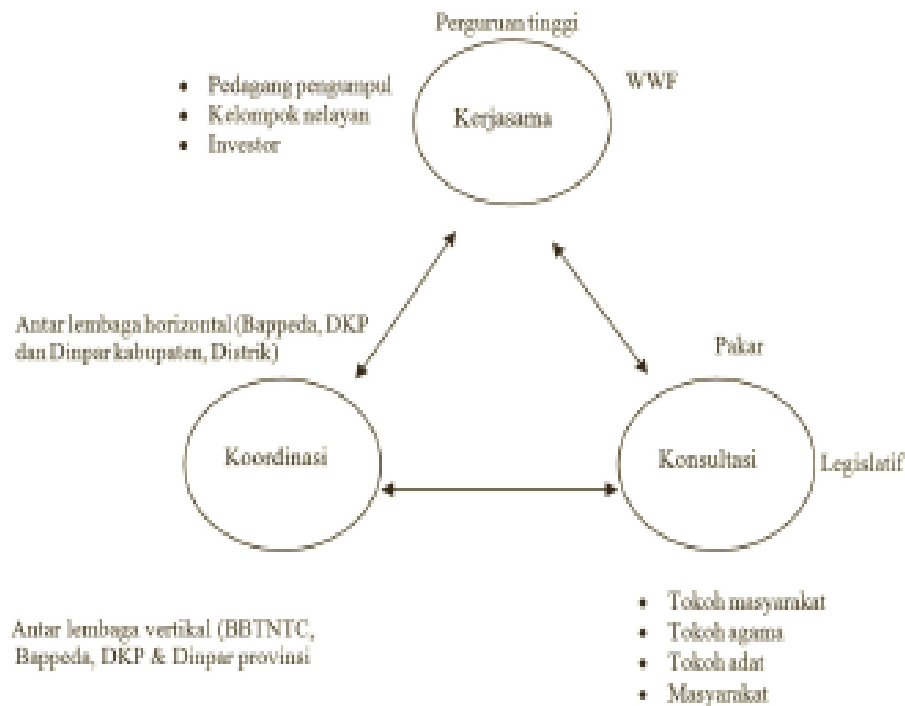
Praktek-praktek kegiatan pengelolaan di ZPT-KKL dapat dikatakan masih pada “tahap partisipasi” dari berbagai *stakeholders* utama (BBTNTC, DKP kabupaten dan WWF) (Bawole 2012). Pengguna lokal (masyarakat) hanya mengikuti proses belajar dalam menerapkan kegiatan pengelolaan. Dalam proses ini, masih ada peluang dalam pengaturan kelembagaan. Perwakilan dan kelompok-kelompok kerja (BBTNTC, DKP Kabupaten, WWF) yang memiliki tujuan sama dapat bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengelolaan ZPT-KKL. Berbagai inisiatif yang terjadi di dalam kawasan, dalam hal instrumen perencanaan yang berbeda (misalnya penerapan zonasi) sering tidak mengikat banyak pihak pengguna. Hal ini berarti dibutuhkan kerjasama kemitraan sehingga mekanisme koordinasi antar *para pemangku kepentingan* dapat disusun dan dilaksanakan secara konsisten.

Analisis para pemangku kepentingan (Bawole 2012) menunjukkan setiap para pemangku kepentingan memiliki peran dalam upaya pembangunan kapasitas lembaga guna keberlanjutan pengelolaan ZPT-KKL. Para pemangku kepentingan kunci (BBTNTC, DKP kabupaten, WWF) berupaya untuk mendukung kapasitas individu, kelompok, organisasi dan jaringan kerja dalam upaya mereka untuk meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan budaya dan sosial. Upaya ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerangka kerja yang dapat mengakomodir semua kepentingan dalam pengembangan pengelolaan di ZPT-KKL melalui manajemen kolaboratif. Upaya pengembangan kapasitas pada satu tingkat atau di salah satu bagian dari para pemangku kepentingan selalu memiliki implikasi pada para pemangku kepentingan lain. Menyadari hal ini diperlukan mekanisme manajemen kolaboratif antar para pemangku kepentingan berkaitan

dengan upaya pengembangan kapasitas mereka dalam memanfaatkan ZPT-KKL. Manajemen kolaboratif ini dapat dilihat dari tiga pilar kerangka kerja mekanisme kelembagaan (Gambar 1).

Manajemen kolaborasi antar para pemangku kepentingan diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal kepada semua para pemangku kepentingan sesuai fungsi dan peranannya. Pengelolaan kolaborasi ZPT-KKL tidak lagi bertumpu pada satu pemangku kepentingan tetapi menyebar dalam kelompok-kelompok pemangku kepentingan untuk mengatur dirinya sendiri

menurut wewenang, peran dan fungsi, serta tanggung jawab masing-masing. Plummer dan Fitzgibbon (2004b) menunjukkan bahwa efisiensi pengambilan keputusan, legitimasi yang lebih luas untuk tindakan dan peningkatan kapasitas pada skala lokal merupakan hal mendasar dalam manajemen kolaboratif. Hal ini berarti bahwa setiap para pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama dalam pengelolaan ZPT-KKL dan menghormati kewenangan yang melekat pada setiap lembaga, sehingga benturan kepentingan dapat dihindari.



Gambar 1 Mekanisme keterpaduan manajemen kolaboratif antar para pemangku kepentingan

Koordinasi program kerja perlu dilakukan terkait dengan berbagai kebijakan dan aturan pada skala nasional, provinsi dan kabupaten, sehingga kinerja kegiatan pengelolaan memberikan efek sinergis pada berbagai tingkat pemerintahan. Pada tahap kerjasama (antara lembaga) lebih diarahkan pada program kegiatan di lapangan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat (nelayan) sekaligus peningkatan biomas sumberdaya. Manajemen kolaboratif memiliki dampak besar pada pengelolaan sumber daya alam, terutama upaya terakhir untuk mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi dan masyarakat (Phummer & Armitage 2007). Fokus utama manajemen kolaboratif terletak pada gagasan bahwa mengalokasikan dan menggunakan sumberdaya yang merupakan tanggungjawab bersama di antara banyak pihak (Pinkerton 1989; Berkes *et al*, 1991). Tahap kerjasama ini difokuskan pada nelayan, kelompok nelayan, rumahtangga nelayan, pedagang (investor) dalam kapasitas mereka memanfaatkan sumberdaya secara berkelanjutan.

Mengacu pada Malone dan Crowston (1994), tingkat koordinasi yang paling baik dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan yang paling tinggi dalam kegiatan manajemen. Dalam konteks ini, *key player* dalam analisis pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingan dapat dilibatkan (Bawole 2012). Kegiatan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dapat prakarsai oleh BBTNTC sebagai pengelola kawasan dan Pemda Teluk Wondama sebagai pemilik

pemerintahan secara administratif. Kedua lembaga ini dapat duduk bersama untuk menyusun program kerja berdasarkan prioritas skala penanganan masalah pengelolaan dan menyusun pendanaan bersama sesuai peran lembaga (misalnya dana APBN dari BBTNTC dan dana APBD dari pemerintah daerah). Aturan representasi harus disepakati bersama lembaga lain sebagai ikatan dalam hubungan kolaborasi yang setara dan berkelanjutan. Dalam hubungan ini, WWF Teluk Wondama dapat berperan aktif dalam proses advokasi membangun kelembagaan masyarakat dan berpartisipasi dalam mendukung kegiatan secara finansial.

Kolaborasi program kerja di lapangan merupakan proses alami melalui negosiasi kepentingan dengan berbagai para pemangku kepentingan yang berada pada posisi *key players* dan pada posisi *subject* (Bawole 2012). Tahapan proses manajemen kolaborasi dimulai dari penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi BBTNTC bersama lembaga non pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar Teluk Wondama), dan selanjutnya membangun konsultasi publik bersama-sama masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lain. Pendekatan manajemen kolaboratif dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi berbagai konflik. Model yang dikembangkan adalah kolaborasi manajemen yang dimulai dari proses-proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, kemudian diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal (Tabel 2).

Tabel 2. Analisis hak, tanggungjawab dan umpan balik para pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan	Hak	Tanggung-jawab	Umpan balik
Bappeda	Perencanaan dan pengendalian	Merancang dan menyampaikan agenda kegiatan	Kinerja kegiatan terukur dan terkendali
BBTNTC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otoritas pengelola</li> <li>Pemberian ijin masuk kawasan (SIMAKSI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyebarkan informasi pengelolaan</li> <li>Menyampaikan tembusan SIMAKSI kepada instansi terkait</li> </ul>	Terpantaunya setiap kegiatan
DKP Kabupaten	Pemberian izin usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan izin berdasarkan kuota, posisi geografis dan peta zonasi</li> <li>Menyampaikan tembusan SIUP kepada para pemangku kepentingan terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Daya dukung tidak terlampaui</li> <li>Perizinan yang dikeluarkan dapat diawasi berbagai pihak</li> </ul>
Dispar Kabupaten	Pemberian ijin usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan izin usaha pariwisata hanya pada zona pariwisata dan zona pemanfaatan</li> <li>Menyampaikan tembusan surat izin usaha Pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan pariwisata tidak masuk pada zona inti</li> <li>PAD dari sektor pariwisata</li> </ul>
Masyarakat	Pemanfaatan sumberdaya	Menjaga dan memelihara kawasan dan sumberdayanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pendapatan dan biomassa ikan</li> <li>Keberlanjutan pemanfaatan</li> </ul>
Polhut/Pol Air	Pengamanan kawasan	Menyebarkan aturan	Kepatuhan aturan

Manajemen dapat dilakukan dengan memahami hak dan tanggung-jawab bersama dalam mengatasi konflik yang terjadi, karena tidak ada lembaga tunggal memiliki kontrol penuh atau pengaruh dalam manajemen ZPT-KKL tetapi masing-masing pihak membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk tujuan manajemen secara bersama. Kerjasama merupakan pola kemitraan yang sesungguhnya dari manajemen kolaboratif, yaitu BBTNTC sebagai pemegang otoritas mandat pengelolaan melakukan kerjasama dengan berbagai stakehoders sebagai mitra yang setara dalam

pembuatan keputusan. Peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi masih tetap dibutuhkan dan faktor koordinasi merupakan salah satu kunci kelangsungan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi (Clifton 2003; Pomeroy *et al.* 2001). Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi hanya terjadi didalam ruang pertemuan atau diatas kertas, karena dalam implementasinya masing-masing sektor masih berjalan sendiri-sendiri mendahulukan kepentingannya. Pilihan kolaborasi yang dicirikan dengan partisipasi, persepsi, komunikasi, koordinasi, dan komitmen

antar para pemangku kepentingan merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan manajemen kolaboratif (Purwanti, 2008). Disamping itu, koneksi jaringan antar para pemangku kepentingan (horizontal dan vertikal) dapat memfasilitasi proses belajar dari kegiatan pengelolaan sebelumnya melalui mekanisme umpan balik dan manajemen adaptif (Bawole *et al.* 2011). Hubungan antar para pemangku kepentingan yang menekankan pada proses sosial dan mendorong fleksibilitas dan membangun kapasitas untuk adaptasi antar para pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan manajemen kolaboratif (Olsson *et al.* 2004; Berkes 2004, Folke *et al.* 2005, Plummer & Armitage 2007).

Armitage *et al.* (2009.) menyatakan bahwa untuk mencapai manajemen kolaboratif yang baik, maka beberapa hal ini perlu diperhatikan, yaitu (1) sistem sumberdaya yang dikelola terdefinisikan dengan baik; (2) kepentingan bersama teridentifikasi dengan baik terutama dari entitas sosial; (3) hak milik yang jelas; (4) akses pengelolaan yang adaptif; komitmen untuk proses jangka panjang dari pembangunan institusi yang berkesinambungan; (5) ketersediaan pelatihan dan sumberdaya; (6) kehadiran para pemimpin kunci, (7) keterbukaan peserta untuk merangkul pluralitas pengetahuan; dan (8) lingkungan kebijakan yang mendukung. Plummer (2009) menekankan bahwa dalam manajemen kolaboratif perlu diupayakan pengelolaan yang adaptif dalam menengani masalah sosial-ekologi. Bawole (2012) menunjukkan beberapa faktor pengungkit (diantaranya peningkatan kinerja ekologi dan ekonomi, regulasi dan manajemen adaptif) dalam mencapai tatakelola yang baik dalam pengelolaan ZPT KKL.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan ZPT-KKL diwujudkan melalui pendekatan manajemen kolaboratif, dan diterapkan sebagai solusi dalam mencapai kondisi sosial-ekologis yang baik. Bentuk koordinasi, kerjasama dan konsultasi dikembangkan dengan manajemen kolaboratif antar para pemangku kepentingan. BBTNTC sebagai pemegang mandat pengelolaan TNTC dapat mengawalinya dengan proses-proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, kemudian diarahkan pada pembagian peran dan tanggungjawab secara formal antar para pemangku kepentingan kunci (DPK Kabupaten/Provinsi, WWF dan masyarakat adat). Pencapaian pengelolaan ZPT-KKL yang efektif dari manajemen kolaboratif perlu dilakukan melalui penyusunan regulasi yang mengikat antar pemangku kepentingan sebagai penggerak proses-proses dalam tahapan manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah AC. 2002. *Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Pustaka Jaya, Jakarta.
- Armitage D, Plummer R, Berkes F, Arthur RL, Charles AT, Davidson-Hunt IJ, Diduck AP, Doubleday N, Johnson DS, Marschke M, McConney P, Pinkerton E, Wollenberg E. 2009. Adaptive co-management for social-ecological complexity. *Frontiers in Ecology and the Environment* 6:95–102. DOI:10.1890/070089
- (Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nabire. 2007. *Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Nabire 2007 – 2027*. Nabire: Bappeda Kabupaten

- (Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat. 2006. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat 2006-2011*. Manokwari: Bappeda Papua Barat.
- (Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. 2006. *Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua 2006-2011*. Jayapura: Bappeda Papua..
- (Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Teluk Wondama. 2005. *Buku Peta Potensi Sumber Daya Kabupaten Teluk Wondama*. Wasior: Bappeda Kabupaten Teluk Wondama.
- (Bappeda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Teluk Wondama. 2008. *Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama 2008 – 2028*. Wasior: Bappeda Kabupaten Teluk Wondama.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 2001. *Proceedings Lokakarya Rencana pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih. Kerjasama Pemda Kab. Manokwari, Pemda Kab. Nabire dan WWF Bioregion Sahul*. Manokwari: Balai TNTC.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 1999. *Draft Rencana Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Periode Tahun 1999-2024 BUKU II, Proyek Pengembangan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih, Tahun Anggaran 1998/1999*. Manokwari: Balai TNTC.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 1999. *Draft Rencana Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Periode Tahun 1999-2024 BUKU I, Proyek Pengembangan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih, Tahun Anggaran 1998/1999*. Manokwari: Balai TNTC.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 2006. *Buku Informasi Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih*. Manokwari: Balai TNTC.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 2007. *Statistik Tahun 2007*. Manokwari: Balai Besar TNTC.
- (BBTNTC) Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih. 2008. *Laporan Tahunan tahun 2008*. Manokwari: Balai Besar TNTC.
- Bawole R, Yulianda F, Bengen DG, Fahrudin A. 2011. Keberlanjutan penatakelolaan zona pemanfaatan tradisional dalam kawasan konservasi laut Taman Nasional Teluk Cenderawasih Papua Barat. *JMHT* 2: 71 – 78.
- Bawole R. 2012. Analysis and Mapping of Stakeholders in Traditional Use Zone within Marine Protected Area. *JMHT* 2: 110 - 117. DOI: 10.7226/jtfm.18.2.110.
- Berkes F, George PJ, Preston RJ. 1991. The evolution of theory and practice of the joint administration of living resources. *Alternatives* 2: 12–18.
- Berkes F. 1989. *Common Property Resources: Ecology and Community-based Sustainable Development*. Belhaven Press, London.
- Berkes, F., 2004. Rethinking community-based conservation. *Conservation Biology* 3: 621–630. DOI: 130.179.16.50.
- Borrini-Feyerabend G, Farvar MT, Nguingui JC, Ndangang VA. 2000. *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing*. GTZ and IUCN, Kasperek Verlag.

- Heidelberg, Germany. <http://nmn.massey.ac.nz/changelinks/cnmr.html>. (7 Juni 2012).
- Borrini-Feyerabend G. 1996. *Collaborative Management of Protected Area: Tailoring the Approach to the Context*. Social Policy Group, IUCN. <http://www.iucn.org/themes/spg/Files/tailor.html>. (7 Juni 2012).
- Carlson L, Berkes F. 2005. Co-management: Concepts and Methodological Implications. *Journal of Environmental Management* 75: 65 - 76. DOI: 10.1016/j.jenvman.2004.11.008.
- (CII, TNC, BBTNIC dan Unipa) Conservation International Indonesia, The Nature Conservation dan Universitas Papua. 2006. RAP of the Bird's Head Peninsula, Papua Indonesia. CII, TNC dan Unipa
- Clifton J. 2003. Prospect for Co-management in Indonesia's Marine Protected Areas. *Marine Policy* 27: 389 - 395. DOI: 10.1016/S0308-597X(03)00026-5.
- Djogo T, Sumaryo, Suhardjito D, Sirait M. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri*. Bahan Ajaran 8. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia, Bogor.
- Folke C, Hahn T, Olsson P, Norberg J. 2005. Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Reviews of Environment and Resources* 30: 441 - 473. DOI: 10.1146/annurev.energy.30.050504.144511
- Mitchell B, Setiawan B, Rahmi DH. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Terjemahan dari: *Resource and Environmental Management*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong LJ. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Natcher DC, Davis S, Hickey, CG. 2005. Co-management: managing relationships, not resources. *Human Organization* 3: 240-250.
- Nikijuluw VPH. 2002. *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional, Jakarta.
- Olsson P, Folke C, Berkes F. 2004. Adaptive comanagement for building resilience in social-ecological systems. *Environmental Management* 1: 75-90. DOI: 10.1007/s00267-003-0101-7
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Pinkerton E. 1989. *Attaining better fisheries management through co-management prospects, problems and propositions*. University of British Columbia Press, Vancouver.
- Pinkerton E. 2003. *Towards specificity in complexity: understanding co-management from a social science perspective*. Kluwer Academic Publications, Dordrecht, The Netherlands.
- Plummer R, Armitage D. 2007. A resilience-based framework for evaluating adaptive co-management: Linking ecology, economics and society in a complex world. *Ecological economics* 61: 62 - 74. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.09.025.
- Plummer R, FitzGibbon J. 2004a. Some observations on the terminology in co-operative environmental management. *Journal of Environmental Management* 70: 63-72. DOI.org/10.1016/j.jenvman.2003.10.005.
- Plummer R, FitzGibbon J. 2004b. Co-management of natural resources: a proposed

- framework. *Environmental Management* 6: 876–885. DOI: 10.1007/s00267-003-3038-y.
- Plummer R. 2009. The adaptive co-management process: an initial synthesis of representative models and influential variables. *Ecology and Society* 2: 24 - 32.
- Pomeroy RS, Berkes F. 1997. Two to tango: the role of government in fisheries co-management. *Marine Policy* 21 (5), 465 – 480. DOI: org/10.1016/S0308-597X(97)00017-1
- Pomeroy RS, Katon BM, Harkes I. 2001. Conditions Affecting the Success of Fisheries Co-management : Lessons from Asia. *Marine Policy* 25: 197-208. PII: S0308-597X(01)00010-0.
- Pomeroy RS. 1996. Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia. *Ocean & Coastal Management* 27: 143–162.
- Purwanti F. 2008. Konsep *Co-Management* Taman Nasional Karimunjawa. [Disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB Bogor.
- Sembiring S, Basumi S, Soeknadi R. Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *JMHT* 2: 84-91.
- Sembiring SN, Husbani F. 1999. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia - Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat*. Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia.
- Siregar M. 2011. Peranan *Stakeholders* terhadap Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. (Tesis). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor . Bogor
- Sitorus MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial untuk Laboratorium Sosiologi, Antropologi, dan Kependudukan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, IPB.
- Suporahardjo. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus*. Pustaka LATIN, Bogor.
- Suratmo G. 2000. *Metode Penelitian Multidisiplin*. IPB Press, Bogor.
- Symes D. 1997. Fisheries management: in search of good governance. *Fisheries Research* 32: 107 – 114. DOI:org/10.1016/S0165-7836(97)00052-0.
- Tadjudin. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Pustaka LATIN, Bogor.
- Wiratno, Indriyo D., Syarifudin A, Kartikasari A. 2004. *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi Pengelolaan Taman Nasional*. FOReST Press, The Gibbon Foundation Indonesia. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Yandle T. 2003. The challenge of building successful stakeholder organizations: New Zealand's experience in developing a fisheries co-management regime. *Marine Policy* 27: 179–192. DOI: 10.1016/S0308-597X(02)00071-4.



## Daftar Isi

### PENGANTAR REDAKSI

DAHURI, R. - <i>Blue Economy: Suatu Pendekatan Untuk Mewujudkan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Inklusif dan Berkelanjutan</i> .....	1
IDRIS, I. - <i>Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dari Kebijakan Ke Implementasi</i> .....	9
SAAD, S., A. DERMAWAN DAN D. G. BENGEN- <i>Pengembangan Minawisata Bahari Sebagai Upaya Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil</i> .....	23
SAAD, S., M. E. RUDIANTO DAN S. DIPOSAPTONO - <i>Adaptasi Perubahan Iklim Dan Mitigasi Terhadap Bencana Dengan Pembangunan Berbasis Desa Pada Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)</i> .....	51
RETRAUBUN, A. S. W. DAN F. D. W. DANGEUBUN- <i>Model Zonasi Pengelolaan Perikanan Pada Ekosistem Lamun Di Kawasan Konservasi Aru Tenggara</i> .....	61
BAWOLE R., F. YULIANDA, D. G. BENGENDAN A. FAHRUDIN- <i>Manajemen Kolaboratif Zona Pemanfaatan Tradisional Taman Nasional Teluk Cenderawasih</i> .....	73



ISSN 2302-5832



0 172302 583209